



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1439 /SEK/KU.00/10/2019 4 Oktober 2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga  
Triwulan III Tahun 2019

- Yth. 1. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI  
2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI  
4. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI  
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia  
6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1187/PB/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang sebagaimana pada pokok surat (terlampir), dengan ini disampaikan kepada seluruh satuan kerja untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan tersebut diatas serta mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) Satuan Kerja menggunakan ADK atau *backup* SAIBA terakhir (*Audited*). Nilai saldo awal LRA, Neraca, Neraca Percobaan, LO dan LPE Tahun 2019 yang dihasilkan dari aplikasi e-Rekon&LK G2 wajib sama dengan nilai saldo akhir dengan laporan yang serupa Tahun 2018;
- 2) Satuan Kerja menggunakan ADK atau *Backup* Persediaan dan SIMAKBMN terakhir (*Audited*). Nilai saldo awal Persediaan dan Aset wajib sama dengan nilai saldo akhir dengan laporan yang serupa Tahun 2018;
- 3) Apabila terdapat perbedaan nilai saldo awal dalam aplikasi Persediaan, SIMAKBMN dan SAIBA, maka satuan kerja berkoordinasi pada tingkat Koordinator Wilayah masing-masing untuk melakukan perbaikan nilai-nilai dan meng-*upload* ulang ADK yang telah diperbaiki ke aplikasi e-Rekon&LK G2;
- 4) Lakukan Rekon Internal sebelum meng-*upload* pada aplikasi e-Rekon&LK G2;
- 5) Tidak diperkenankan melakukan Jurnal secara serampangan pada aplikasi SAIBA terkait hal "Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister" dalam rangka menghilangkan "Belum Diregister" yang mengakibatkan perubahan nilai pada aplikasi SAIBA;
- 6) Satuan Kerja agar menyimpan ADK atau *backup* Persediaan, SIMAKBMN dan SAIBA dengan rapi dan benar (*backup audited* dan *backup* tahun berjalan) serta meng-*upload* ke aplikasi KOMDANAS;
- 7) Satuan Kerja wajib menyusun Laporan Keuangan Triwulan III (LRA, Neraca, Neraca Percobaan, LO dan LPE) dari aplikasi e-Rekon&LK G2.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Sekretaris  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
2. Panitera Mahkamah Agung RI
3. Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung RI
4. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama pada Mahkamah Agung RI.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO  
2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 PSW 5200 FAKSIMILE 021-3846402  
Website : [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- 1187 /PB/2019 [ Oktober 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga  
Triwulan III Tahun 2019

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/  
Wakil Kepala/Direktur Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/  
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Lampiran I)

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2019, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada LKKL Semester I Tahun 2019 masih terdapat berbagai permasalahan, antara lain:
  - a) Kesalahan akun akibat penerapan perubahan batas minimum kapitalisasi;
  - b) Penerapan eliminasi transaksi penerimaan BLU yang berasal dari entitas pemerintah pusat;
  - c) Permasalahan transaksi antar entitas;
  - d) Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sampai level Satuan Kerja;
  - e) Pengungkapan pada CaLK yang kurang memadai.
  - f) Penyajian Penilaian BMN 2017-2018 ditunda (*Take Out Revaluasi*);
2. Pada tahun 2019 terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan LKKL, antara lain:
  - a) Masih terdapat selisih rekonsiliasi internal saldo awal serta selisih rekonsiliasi internal bulanan antara Rph SAIBA dengan Rph SIMAK pada e-Rekon&LK.
  - b) Penerapan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Kep-211/PB/2019 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar beserta perubahannya (terakhir diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-154/PB/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar terkait:
    - 1) restrukturisasi akun PNBPN, tidak digunakan lagi akun 423XXX diganti dengan akun 425XXX;

2) perubahan...

- 2) perubahan pengelompokan akun baru, serta penggabungan beberapa akun dalam akun baru serta pemecahan satu akun menjadi beberapa akun baru.  
Satker agar mengunduh aplikasi *BAS Mobile Online* pada *Google Play Store* sebagai pedoman dalam penentuan kodefikasi dan klasifikasi dalam pengelolaan keuangan (mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan).
  - c) Penguatan atas berlakunya Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap yang baru untuk nilai Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Renovasi (ATR) berupa Gedung dan Bangunan, serta ATR berupa Peralatan dan Mesin sesuai PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, agar K/L terhindar dari kesalahan penggunaan akun;
  - d) Pelaksanaan identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal antara satker Badan Layanan Umum (BLU) sebagai penerima kerja (pendapatan) dengan satker BLU maupun non BLU sebagai pemberi kerja (belanja) agar dilakukan dengan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-621/PB/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal petunjuk Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dan Satker Entitas Pemerintah Pusat untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019;
3. Terdapat beberapa hal yang terjadi pada periode pelaporan sebelumnya yang perlu diantisipasi, agar tidak terulang lagi atau dipastikan telah diselesaikan pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut:
    - a) Revaluasi BMN atas Aset Tetap telah diinput dan divalidasi dengan cermat;
    - b) Penyelesaian Koreksi BPK yang dilakukan melalui jurnal manual di Satker Konsolidasi dengan berpedoman pada Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-499/PB.6/2019 tanggal 24 Juli 2019 hal Penyelesaian Saldo pada Neraca Satker Konsolidasi (Satkons) 2018;
    - c) Selisih TK/TM baik secara absolut maupun secara *netto* agar dijelaskan secara memadai pada CaLK, misalnya selisih karena Aset Tetap Renovasi atau selisih karena penerapan Harga Perolehan Terakhir dalam pencatatan Persediaan.
  4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka menghasilkan LKKL Tahun 2019 yang berkualitas, seluruh K/L diminta untuk menyusun LKKL Triwulan III Tahun 2019 dengan melakukan telaah LK sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.
  5. LKKL disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan paling lambat tanggal **31 Oktober 2019**. (Laporan BMN Triwulan III Tahun 2019 tidak perlu disusun, karena laporan BMN hanya disusun periode semesteran dan tahunan saja)
  6. Proses rekonsiliasi eksternal dan unggah data dalam rangka penyusunan LKKL Triwulan III Tahun 2019 dapat dilaksanakan sesuai surat kami nomor S-944/PB/2019 yaitu mulai tanggal 1-13 Oktober 2019 dan 16-30 Oktober 2019 melalui aplikasi e-Rekon&LK pada situs

<http://e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id>. Mekanisme dan proses penyusunan LKKL disajikan dalam lampiran III.

7. LKKL Triwulan III Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam angka 4 disusun dengan berpedoman pada PMK nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL, terdiri dari:
  - a) Pernyataan Telah Direviu;
  - b) Pernyataan Tanggung Jawab;
  - c) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas;
  - d) Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Dalam Penyusunan Laporan Keuangan agar setiap satker pada masing-masing K/L telah mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana diatur dalam PMK nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Andin Hadiyanto

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Inspektur Jenderal/Inspektur/SPI/APIP seluruh Kementerian Negara/Lembaga
3. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia;
5. Para Kepala KPPN seluruh Indonesia;
6. Para Kepala KPKNL seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I  
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Nomor: S-1127/PB/2019  
Tanggal: 1 Oktober 2019

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/  
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.	Dewan Perwakilan Rakyat
3.	Dewan Perwakilan Daerah
4.	Badan Pemeriksa Keuangan
5.	Mahkamah Agung ✓
6.	Mahkamah Konstitusi
7.	Komisi Yudisial
8.	Kejaksaan Agung
9.	Kementerian Sekretariat Negara
10.	Kementerian Dalam Negeri
11.	Kementerian Luar Negeri
12.	Kementerian Pertahanan
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14.	Kementerian Keuangan
15.	Kementerian Pertanian
16.	Kementerian Perindustrian
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18.	Kementerian Perhubungan
19.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20.	Kementerian Kesehatan
21.	Kementerian Agama
22.	Kementerian Ketenagakerjaan
23.	Kementerian Sosial
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

No.	Kementerian Negara/Lembaga
31.	Kementerian Pariwisata
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
33.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
34.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
45.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Badan Informasi Geospasial
61.	Badan Standardisasi Nasional
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Lembaga Administrasi Negara
64.	Arsip Nasional Republik Indonesia
65.	Badan Kepegawaian Negara
66.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Kementerian Perdagangan

No.	Kementerian Negara/Lembaga
68.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
69.	Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Ombudsman
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Sekretaris Kabinet
81.	Badan Pengawas Pemilu
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Badan Keamanan Laut
86.	Badan Ekonomi Kreatif
87.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN  
 TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
 PERIODE TRIWULAN III 2019

Kode BA dan Nama K/L: ( )

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP			Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
3. LRA, Neraca, LO dan LPE face			Ada
4. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan AkruaI			Ada
2. Neraca Percobaan Kas			Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&amp;LK</b>			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2018?			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&amp;LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>			
<b>Neraca Balance</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"			Tidak
<b>Saldo antar Laporan</b>	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE			Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca			Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
<b>NERACA PERCOBAAN AKRUAL</b>			
<b>PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada"? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
<b>TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN</b>			
<b>AKUN ASET (1xxxxx)</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.			Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)			Tidak

<b>Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)</b>		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			Tidak
2.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
<b>AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)</b>		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
<b>Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)</b>		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ya/Tidak
2.	Apakah Saldo Akun 218211 akhir tahun berkurang dibanding awal tahun?			Ya/Tidak
3.	Jika berkurang, apakah ada pengesahan Hibah Langsung TAYL (MPHL-BJS TAYL) ?			Ya
<i>Akun 218211 hanya dapat berkurang jika ada pengesahan Hibah Langsung TAYL. Cek apakah ada pengurangan dengan Jurnal, teliti kebenaran/keabsahan jurnal tsb.)</i>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?			Ya
<b>AKUN EKUITAS (3xxxxx)</b>		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Tidak
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya bernilai wajar?			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>				
<b>Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)</b>				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&amp;LK (menu monitoring &gt;&gt; Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
<b>AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)</b>				
<b>Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)</b>		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
<b>Ketepatan penggunaan Akun PNBPN Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)</b>		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx			Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak
<b>Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN</b>		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL			Tidak
<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)			Tidak

Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
<b>Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
<b>AKUN BELANJA (5xxxxx)</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
<b>TELAH TERKAIT BLU</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Ada/Tidak
<i>Jika ada, berarti ada pendapatan &amp; Belanja BLU yang belum di SP3B-BLU-kan, adakah penjelasannya ?</i>			
2. Apakah telah melakukan identifikasi transaksi belanja/pendapatan dengan Satker Pemerintah Pusat lainnya (Untuk eliminasi BLU) ?			Ya
<b>Jika TIDAK Memiliki Satker BLU</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
<b>Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>			
5. Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>			
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
<b>Pengecekan saldo Normal</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
<b>Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya. Untuk Triwulan III, Tidak ada revaluasi aset tetap dan jurnal Take Out Revaluasi</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
<b>Pengecekan akun koreksi</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
<b>Contoh 1 :</b> Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
<b>Contoh 2 :</b> Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.			

### NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2018, Apakah demikian?			Ya

### TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
<b>Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
<b>Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Pyenyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
<b>Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
<b>Pengecekan persediaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
<b>Pengecekan penyusutan aset tetap</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&amp;LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			

Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ( ) ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan September 2019 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&amp;LK G2 lihat menu "Monitoring BMN&gt;&gt; Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya
Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi ,			
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")			Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?			Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?			Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS			Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
<i>e-Rekon&amp;LK Menu Monitoring &gt;&gt; Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			

### SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2018 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?			Ya
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-Out Reval dengan benar ?			Ya
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2019</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?			Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?			Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
4. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
5. Adakan PNBP digunakan langsung?			Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
8. ....			Ya

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya

### ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Triwulan III 2019 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2019			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir ( <i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i> )			Ya

*Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.*

## LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta  
hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

*(contoh) Lampiran Kertas Kerja Telaah LK Kementerian Kesehatan*

1. Saldo tidak normal Kas di BP bersaldo kredit senilai Rp600.000, karena terdapat kesalahan akun dalam penyeteroran penihilan TUP pada satker Sekditjen Yankes, yang seharusnya menggunakan akun 815511-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan tetapi telah disetor menggunakan akun 815111-Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan
2. Terdapat Akun Ekuitas Transaksi Lainnya pada satker Dinas Kesehatan Makassar yang seharusnya hanya terdapat di RRI/POLRI/TVRI, karena kesalahan penggunaan akun dalam penjurnalan, akan diperbaiki di Triwulan IV 2019
3. Terdapat akun 425351-Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama, pada satker Dinas Kesehatan Bengkulu, yang seharusnya setoran tersebut hanya ada di kemenag. Konfirmasi ke satker telah diajukan ralat ke KPPN Mitra di bulan Oktober 2019

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

( )  
NIP

....., .....

Penelaah,

( )  
NIP

**Proses Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga  
Triwulan III Tahun 2019**

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Triwulan III Tahun 2019 adalah LKKL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2019 yang disusun secara lengkap yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri Pernyataan Telah Direviu dan Pernyataan Tanggung Jawab. Tujuan penyusunan LKKL Triwulan III Tahun 2019 adalah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan mencari solusi terbaik guna mewujudkan LKKL Tahun 2019 yang lebih berkualitas.

LKKL disusun secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA per tanggal 30 September 2019, dengan berpedoman pada PMK nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL, dan PMK 104/PMK.05/2018 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan Kementerian Negara/Lembaga. LKKL Triwulan III Tahun 2019 disajikan sama dengan format LKKL tahunan. Proses penyusunannya adalah sebagai berikut:

**1. Aplikasi**

Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan LKKL Triwulan III Tahun 2019 adalah:

**a. SAIBA**

- SAIBA Satker versi 19.02 atau yang lebih baru.

**b. SIMAK BMN**

- SIMAK BMN tingkat Satker versi 19.1 atau yang lebih baru.

**c. PERSEDIAAN**

- Aplikasi Persediaan versi 19.0.1a atau yang lebih baru.

Aplikasi tersebut dapat diunduh pada situs <http://djpbk.kemenkeu.go.id>.

**d. SAKTI**

- Aplikasi SAKTI bagi Satker lingkup Kementerian Keuangan dan PPAK.

**e. E-Rekon&LK**

- Untuk penyusunan LK tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA, LKKL Triwulan III Tahun 2019 harus menyajikan angka yang sama dengan aplikasi e-Rekon&LK.

## 2. Jenis Komponen Laporan Keuangan

LKKL Triwulan III Tahun 2019 terdiri dari:

### a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA disusun untuk transaksi sampai dengan 30 September 2019. Lembar muka (*face*) masing-masing laporan tersebut disajikan berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja bulan September 2019 dan dibandingkan dengan 30 September 2018.

### b. Laporan Operasional (LO)

LO disusun untuk transaksi sampai dengan 30 September 2019 dan dibandingkan dengan 30 September 2018.

### c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE disusun untuk transaksi sampai dengan 30 September 2019 dan dibandingkan dengan 30 September 2018. Format penyajian dan pengungkapan LPE berpedoman pada PMK nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

### d. Neraca

Neraca disusun untuk transaksi per 30 September 2019. Lembar muka (*face*) masing-masing laporan tersebut dibandingkan dengan Neraca per 31 Desember 2018 *audited*.

### e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK disusun dengan mengungkapkan hal-hal yang diharuskan atau dianjurkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Buletin Teknis SAP. Kementerian Negara/Lembaga dapat mengikuti ilustrasi pada PMK nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing entitas.

## 3. Penyajian Akun-akun pada Laporan Keuangan

### a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan adalah saldo per 30 September 2019 sesuai dengan nilai pada aplikasi e-Rekon&LK.

### b. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan adalah uang kas yang ada pada Bendahara Penerimaan pada tanggal 30 September 2019. Saldo tersebut dihasilkan dari jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA / SAKTI dengan akun Kas di Bendahara Penerimaan pada sisi debet dengan akun pendapatan LO terkait pada sisi kredit.

### c. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang disajikan adalah saldo per 30 September 2019. Entitas harus sudah melakukan pencatatan/penjurnalan untuk transaksi-transaksi Kas Lainnya dan Setara Kas sampai dengan tanggal 30 September 2019.

**d. Kas di BLU**

Saldo Kas di BLU yang disajikan adalah saldo per 30 September 2019.

**e. Investasi (BLU)**

Saldo Investasi (BLU) yang disajikan adalah saldo per 30 September 2019. Entitas harus sudah melakukan pencatatan/penjurnalan untuk transaksi-transaksi Investasi (BLU) sampai dengan tanggal 30 September 2019.

**f. Piutang PNBP**

Saldo Piutang PNBP yang disajikan adalah saldo per 30 September 2019. Entitas melakukan pencatatan/penjurnalan untuk transaksi-transaksi Piutang PNBP sampai dengan tanggal 30 September 2019.

**g. Penyisihan Piutang**

Saldo Penyisihan piutang yang disajikan adalah saldo penyisihan per 30 Juni 2019 atau sama dengan saldo Penyisihan piutang pada LK semester I Tahun 2019.

**h. Persediaan**

Saldo Persediaan yang disajikan adalah saldo persediaan sesuai dengan persediaan yang dimiliki entitas pada tanggal 30 September 2019. Pencatatan atas akun Persediaan dilakukan dengan memperhatikan, antara lain:

- 1) Entitas telah melakukan pencatatan atas semua mutasi persediaan pada Aplikasi Persediaan/ Modul Persediaan pada aplikasi SAKTI.
- 2) Pencatatan atas transaksi persediaan dilakukan hanya dengan Aplikasi Persediaan/ Modul Persediaan pada aplikasi SAKTI, kecuali untuk BLU yang telah memiliki aplikasi mandiri yang khusus dan komprehensif.
- 3) Entitas tidak diperkenankan menggunakan jurnal manual untuk mencatat persediaan pada Aplikasi SAIBA / SAKTI, kecuali apabila jurnal yang dihasilkan dari Aplikasi Persediaan / SIMAK BMN (Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap pada aplikasi SAKTI) tidak tepat.
- 4) *Opname* fisik atas Persediaan tidak wajib dilakukan.
- 5) Akun Persediaan yang Belum Diregister dapat tersaji pada LKKL Triwulan III Tahun 2019 dengan menjelaskan penyebabnya dalam CaLK.

**i. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang disajikan adalah saldo per 30 September 2019.

**j. Aset Tetap dan Aset Lainnya**

Saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya yang disajikan adalah saldo per 30 September 2019. Akun Aset Tetap Belum Diregister dan Aset Lainnya Belum Diregister dapat tersaji pada LKKL Triwulan III Tahun 2019 dengan menjelaskan penyebabnya dalam CaLK.

**k. Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan yang disajikan dalam LKKL Triwulan III Tahun 2019 adalah akumulasi penyusutan sampai dengan 30 Juni 2019 atau semester I Tahun 2019, kecuali terdapat transaksi BMN yang menghasilkan pencatatan penyusutan transaksional atau menimbulkan pergeseran saldo akumulasi penyusutan semester I tahun 2019.

**l. Akumulasi Amortisasi**

Akumulasi Amortisasi yang disajikan dalam LKKL Triwulan III Tahun 2019 adalah akumulasi amortisasi sampai dengan 30 Juni 2019 sesuai dengan nilai pada aplikasi e-Rekon&LK, kecuali terdapat transaksi BMN yang menimbulkan pergeseran saldo akumulasi amortisasi semester I tahun 2019.

**m. Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN yang disajikan adalah saldo per 30 September 2019.

**n. Utang kepada Pihak Ketiga**

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga yang disajikan adalah saldo per 30 September 2019. Entitas harus sudah melakukan pencatatan atas seluruh transaksi Utang kepada Pihak Ketiga sampai dengan tanggal 30 September 2019.

**o. Hibah Langsung yang Belum Disahkan**

Saldo Hibah Langsung yang Belum Disahkan yang disajikan adalah saldo per 30 September 2019.

**p. Pendapatan**

Saldo akun Pendapatan yang disajikan adalah saldo atas semua transaksi pendapatan sampai dengan tanggal 30 September 2019. Penyesuaian dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019.

**q. Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang yang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, dan Beban Bantuan Sosial**

Saldo akun beban-beban tersebut di atas yang disajikan dalam LO adalah saldo atas semua transaksi terkait sampai dengan tanggal 30 September 2019. Penyesuaian tidak diperlukan atas transaksi beban-beban di atas. Penyesuaian dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019.

**r. Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan yang disajikan dalam LKKL Triwulan III Tahun 2019 adalah beban penyusutan sampai dengan 30 Juni 2019 atau semester I Tahun 2019, kecuali terdapat transaksi BMN yang menimbulkan pergeseran saldo beban penyusutan semester I tahun 2019.

**s. Beban Amortisasi**

Beban Amortisasi yang disajikan dalam LKKL Triwulan III Tahun 2019 adalah beban penyusutan sampai dengan 30 Juni 2019 atau semester I Tahun 2019, kecuali terdapat transaksi BMN yang menimbulkan pergeseran saldo beban amortisasi semester I tahun 2019.

**t. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang disajikan dalam LKKL adalah beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 30 Juni 2019 atau semester I Tahun 2019.

**u. Akun-akun ekuitas**

Akun-akun ekuitas yang disajikan adalah untuk transaksi ekuitas sampai dengan 30 September 2019. Pengungkapan atas akun-akun ekuitas mengacu pada PMK nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Penyajian akun-akun selain yang sudah disebutkan di atas dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

**4. Jadwal Penyusunan LKKL Triwulan III Tahun 2019**

Jadwal *open/closed period* e-Rekon&LK, penyusunan, pengiriman LKKL Triwulan III Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**a. *Open* dan *closed period* e-Rekon&LK**

- 1) *Open period* e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 13 Oktober 2019 dan 17 s.d. 30 Oktober 2019
- 2) *Closed period* e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 14-16 Oktober 2019
- 3) Kementerian Negara/Lembaga dapat mengatur jadwal *open/closed period* e-Rekon&LK dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL Triwulan III Tahun 2019 dengan berkoordinasi dengan Direktorat APK.

**b. Jadwal penyusunan LKKL Triwulan III Tahun 2019 adalah sebagai berikut:**

<b>Tingkat</b>	<b>Batas Waktu Penyampaian LK</b>
UAKPA	16 Oktober 2019
UAPPA-W	22 Oktober 2019
UAPPA-E1	25 Oktober 2019
K/L	<b>31 Oktober 2019</b>

**c. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi eksternal mengacu pada S-944/PB/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN bulan Juli sampai dengan November 2019.**

## 5. Transaksi yang bersumber dari PHLN

Bagi Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki transaksi yang bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), diatur sebagai berikut:

- a. Periode pemeriksaan LK PHLN (yang disusun oleh *executing agency* di K/L) oleh auditor yang ditunjuk (BPK/BPKP/Kantor Akuntan Publik), agar diselaraskan dengan periode pemeriksaan LKKL Tahun 2019.
- b. Dalam rangka penyelarasan penyajian dan pengungkapan atas transaksi K/L yang bersumber dari PHLN, K/L terkait agar mengungkapkan secara memadai mengenai realisasi belanja, perolehan aset dan kewajiban yang timbul dari proyek yang bersumber dari PHLN pada catatan penting lainnya di CaLK LRA. Di samping itu, K/L terkait agar juga menyusun ikhtisar LK PHLN sesuai dengan format pada lampiran IV dan V untuk dilampirkan pada LKKL Triwulan III Tahun 2019.
- c. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana angka 5b di atas, tidak mengurangi kewajiban *executing agency* penerima pinjaman dan hibah membuat laporan kepada masing-masing donor.
- d. Hibah yang dimaksud adalah jenis hibah terencana yang bersumber dari luar negeri

## 6. Lain-lain

a. Pada tahun 2019 terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan LKKL, antara lain:

### 1) Penerapan e-Rekon&LK G2.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Pastikan saldo awal BMN seluruh satker aktif dan *inaktif* telah benar sebagaimana diatur pada Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nomor S-3689/KN/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2018.
- b) Pastikan data BMN pada LKKL = data BMN pada aplikasi e-Rekon&LK. Apabila terdapat perbedaan, entitas dapat melakukan analisis melalui menu Rekonsiliasi Internal pada aplikasi e-Rekon&LK.
- c) Mempelajari e-Rekon&LK G2 agar dapat menggunakan e-Rekon&LK G2 secara optimal/baik dalam proses penyusunan, penelaahan, dan reuiu LKKL dan LBMN.

2) Dengan diluncurkannya aplikasi BAS *Mobile Online* yang berbasis Android sejak tanggal 12 September 2019, seluruh satker agar dipastikan telah menggunakan akun baru, dan apabila terlanjur terjadi kesalahan agar dipastikan telah dikoreksi melalui ralat dokumen pengeluaran/penerimaan negara kepada KPPN mitra kerja dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2016 tentang tata cara koreksi data transaksi keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

- 3) Berubahnya Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap yang berlaku sejak TA 2018.  
Perubahan nilai minimum kapitalisasi BMN berpotensi pada timbulnya kekeliruan pada penggunaan akun belanja barang atau akun belanja modal dalam melakukan pengadaan barang. Atas kekeliruan penganggaran dan keterlanjuran pencairan anggaran tersebut, maka perlu dilakukan koreksi SPM dan/atau Revisi DIPA.
  - 4) Identifikasi transaksi resiprokal antara satker BLU sebagai penerima kerja (Pendapatan) dan satker BLU maupun non BLU sebagai pemberi kerja (Belanja), agar lebih memudahkan proses eliminasi transaksi resiprokal baik di level K/L maupun di Level LKPP.
  - 5) Agar melakukan Telaah Laporan Keuangan mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I, sampai dengan tingkat K/L, sebagaimana dimaksud pada lampiran II.
- b. Tindak Lanjut permasalahan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019
- Terdapat beberapa hal yang terjadi pada tahun 2018 yang perlu diantisipasi agar tidak terulang lagi atau dipastikan telah diselesaikan pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
- 1) Revaluasi BMN atas Aset Tetap
    - a) memastikan jurnal lanjutan revaluasi tahun 2018 pada Satker Konsolidasian telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Surat Direktur APK nomor S-499/PB.6/2019 tanggal 24 Juli 2019 hal Penyelesaian Saldo pada Neraca Satker Konsolidasi (Satkons) 2018;
    - b) memastikan proses revaluasi BMN telah selesai dilaksanakan;
    - c) memastikan hasil revaluasi tahun 2017 dan 2018 telah dicatat dengan benar berikut jurnal lanjutannya pada Satkons;
  - 2) Penyelesaian Koreksi BPK yang dilakukan melalui Jurnal manual di Satker Konsolidasi.  
Masih terdapat beberapa K/L yang belum menyelesaikan koreksi melalui jurnal manual sesuai Surat Direktur APK nomor S-499/PB.6/2019 hal Penyelesaian Saldo pada Neraca Satker Konsolidasi (Satkons) 2018. K/L perlu memastikan koreksi yang dilakukan telah tepat dan secara Neraca Percobaan tidak berubah nilainya, sehingga tidak merubah Saldo Akhir 2018 atau Saldo Awal 2019.
  - 3) Selisih TK/TM yang disebabkan oleh Aset Tetap Renovasi, Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah, dan Harga Perolehan Terakhir baik secara absolut maupun secara *netto* harus dijelaskan secara memadai pada CaLK.
- c. Hal-hal lain yang harus mendapat perhatian Kementerian Negara/Lembaga dalam penyusunan LKKL Triwulan III Tahun 2019, antara lain:
- 1) Memastikan bahwa telah dilakukan jurnal balik (*reversing entries*) yang benar untuk transaksi penyesuaian tanggal 31 Desember 2018 (Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Belanja Dibayar di Muka, dan/atau transaksi Pendapatan Diterima di Muka) sesuai PMK nomor 225/PMK.05/2016

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat. Hal ini untuk menghindari risiko dari pencatatan ganda atas beban dan/atau pendapatan.

- 2) Koreksi harus dilakukan untuk semua transaksi sampai dengan 30 September 2019 yang pencatatan/penjurnalannya tidak tepat, sesuai dengan ketentuan.
- 3) Pencatatan seluruh transaksi, termasuk koreksi/perbaikan untuk data sampai dengan 30 September 2019 agar didokumentasikan dengan baik.